

Merubah Paradigma Pesta Demokrasi Menjadi Gotong Royong Demokrasi: Inspirasi dari Desa Malangan

Transforming the Paradigm of the Democracy Festival into Cooperative Democracy: Inspiration from Malangan Village

Kenken Dimas Nugroho¹, Kharis Eirena², Muhammad Fadhli Rahman³

^{1,2,3} Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang
E-mail: ¹Kenkendimas3@students.unnes.ac.id, ²khariseiren@students.unnes.ac.id,
³fadhli rahman1310@students.unnes.ac.id

Abstrak

Pemilihan Umum atau Pemilu dalam negara demokrasi, seperti di Indonesia menjadi sebuah keniscayaan. Pemilu secara esensial memiliki tujuan sebagai seperangkat proses untuk menciptakan rotasi kekuasaan, melaluinya Pemilu akan berperan sebagai saran penunjang tata kelola negara yang demokratis. Kompleksitas persoalan Pemilu tidak hanya berada pada persoalan administrasi dan manajemen regulasi, melainkan juga terletak pada internalisasi wacana. Melalui peletakan narasi arus utama, yang memandang jika proses Pemilu adalah momentum terselenggaranya pesta demokrasi. Pesta yang sangat erat kaitannya dengan mekanisme perayaan secara ingar-bingar, sehingga melangengkan pola relasi sosial yang cenderung meletakkan pragmatisme politik sebagai euforia utamanya. Oleh sebab itu, artikel ini menawarkan konsepsi baru untuk merubah paradigma Pemilu sebagai pesta demokrasi menjadi gotong royong demokrasi. Gotong royong demokrasi memproyeksikan dirinya sebagai suatu daya usaha bersama-sama guna merekonstruksi kembali esensi Pemilu, sebagai proses demokrasi yang harus demokratis. Sehingga realitas politik negatif seperti politik uang dan kampanye hitam, yang dilakukan demi mengakomodir pragmatisme kepentingan dan kekuasaan dapat dikesampingkan. Sebagai penutup, kajian ini membahas hasil kegiatan sosialisasi pendidikan politik generasi muda, yang dilakukan oleh kelompok UNNES Giat 7. Sebagai bentuk pengabdian masyarakat di Desa Malangan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Kata kunci: pemilu, pesta demokrasi, gotong royong demokrasi

Abstract

Elections or elections in democratic countries, such as Indonesia, are a necessity. Elections essentially have the purpose of being a set of processes to create a rotation of power, whereby elections will serve as a supporting means for democratic state governance. The complexity of election issues lies not only in administrative and regulatory management issues but also in the internalization of mainstream discourse. Through the framing of the narrative, the election process is seen as a moment for holding a democratic festivity. A festivity that is closely associated with the mechanism of celebration in a noisy manner, thus perpetuating a pattern of social relations that tends to place political pragmatism as its main euphoria. Therefore, this article offers a new conception to change the paradigm of elections as a democratic festivity into a democratic mutual cooperation. Community democratic mutual cooperation projects itself as a collective effort to reconstruct the essence of elections, as a democratic process that must be democratic. Thus, negative political realities such as money politics and black campaigns, carried out to accommodate the pragmatism of interests and power, can be sidelined. In conclusion, this study discusses the results of political education socialization activities for the younger generation, conducted by the UNNES Giat 7 group. This is a form of community service in Malangan Village, Tulung District, Klaten Regency, Central Java.

Keyword: election, festival democracy, mutual cooperation democracy

1. PENDAHULUAN

Pemilu tahun 2024 menjadi momentum penting dalam proses demokratisasi di Indonesia, karena akan menjadi penyelenggaraan Pemilu serentak untuk kedua kalinya setelah Pemilu tahun 2019. Pemilu serentak tercatat akan diselenggarakan pada 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, hingga Anggota DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten. Secara estuasi Pemilu akan dilakukan secara langsung untuk menggantikan pejabat publik secara berkala, yakni lima tahun sekali [1]. Pemilu dapat diartikan dengan sederhana sebagai proses pengupayaan berlangsungnya *rotation of power* secara demokratis. Konsep pergantian jabatan publik secara periodik, merupakan salah satu esensi terpenting dalam berdirinya sebuah negara demokrasi. Melalui kekuasaan politik dapat dibatasi, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*.

Selain itu, Pemilu juga dipandang sangat penting peranannya, karena merupakan perwujudan paling konkret partisipasi warga negara atau rakyat dalam proses penyelenggaraan negara [2]. Dalam konteks ini, rakyat harus memahami politik untuk mengetahui bagaimana konstruksi berpikir calon pemimpin yang akan dipilih, supaya selaras dengan apa yang rakyat kehendaki [3]. Kondisi demikian akan mewujudkan proses *token of membership* dalam menciptakan semangat peradaban bernama demokrasi [4]. Sehingga Pemilu dalam negara demokrasi juga berperan sebagai bagian dari konstruksi penting yang mendorong terciptanya modernisasi dan moderasi politik kewargaan.

Secara konseptualisasi Pemilu bukan hanya persoalan proses memilih siapa yang akan mewakili masyarakat dalam politik, melalui kalkulasi suara mayoritas warga negara. Tetapi juga seyogianya dijadikan sebagai momentum untuk mendorong penguatan literasi dan pemahaman politik masyarakat. Masyarakat harus pandai melihat dinamika politik dan melihatnya sebagai pilar penting keberlangsungan Pemilu, dengan cara memiliki pemahaman yang baik akan program dan visi misi calon pemimpin [5]. Sehingga dapat mewujudkan proses Pemilu yang berkualitas dan juga berintegritas.

Namun, Pemilu sejatinya mendapati beberapa tantangan yang belum berhasil dijawab dan ditemukan solusi permasalahannya secara konkret. Ni Komang Ayu dan I Gede Fery dalam penelitiannya melalui sosialisasi tantangan dan risiko Pemilu tahun 2024 yang dilakukan kepada siswa siswi SMAN 3 Denpasar. Menjelaskan jika Pemilu sejatinya menghadapi beberapa pokok tantangan, diantaranya mengenai distribusi logistik, praktik kecurangan dan netralitas dalam Pemilu, pencegahan manipulasi data, hingga maraknya berita *hoax* dan *black campaign* [6]. Tantangan-tantangan tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah untuk seluruh stake holder yang saling berkaitan, dari mulai petugas penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, hingga masyarakat itu sendiri sebagai konstituen.

Pada tahap ini, sejumlah tantangan Pemilu tersebut dimungkinkan terjadi karena begitu kuatnya hegemoni wacana arus utama yang mendefinisikan Pemilu sebagai pesta demokrasi. Wacana tersebut dapat dideteksi misalnya, melalui penelitian dari Azirah, Kesumawati, dan Fitriliana yang melakukan sosialisasi pemilih pemula dalam pesta demokrasi kepada mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia [7] Mendefinisikan Pemilu sebagai pesta demokrasi secara tidak langsung akan menyebabkan bergesernya esensi utama Pemilu, dengan lebih mengedepankan keterbutuhan atas bergulirnya kepentingan modal dan sumber daya ekonomi. Gentur Isra'j, Priska Illiyina, dan Heni Masruroh secara eksplisit menggambarkan kondisi tersebut, melalui penelitian yang mengkontekstualisasikan Pemilu sebagai pesta demokrasi yang akan menciptakan perkembangan kondisi ekonomi paska pandemi covid-19. Melalui ini dapat diterjemahkan, jika Pemilu merupakan peristiwa politik non-ekonomi yang dapat mempengaruhi keputusan investor di pasar modal dan bursa efek di Indonesia [8].

Di sisi lain, meskipun pesta demokrasi didefinisikan sebagai prosedur program yang ditawarkan negara guna memastikan mandat atau amanat rakyat teragregasi dengan proses yang demokratis [9]. Namun, mendefinisikan Pemilu sebagai pesta demokrasi adalah sebuah pemaknaan yang kurang tepat pada realitasnya. Pesta akan cenderung dekat dengan pengandaian atas perayaan yang sarat akan nilai material dan pragmatis. Sehingga Pemilu cenderung mendekati dirinya kepada fenomena negatif dalam politik, seperti masifnya *money politics*, *black campaign*, hingga maraknya disinformasi. Melalui ini integritas Pemilu, hingga kesatuan dan persatuan bangsa, menjadi agenda yang sangat dipertaruhkan dari setiap proses berlangsungnya pesta demokrasi.

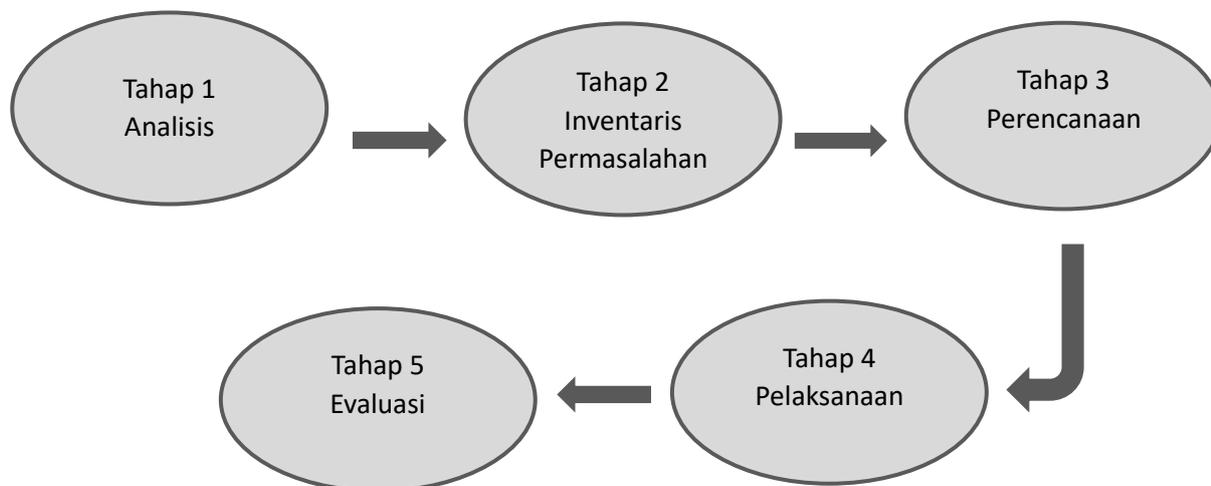
Berangkat dari permasalahan tersebut, kelompok Kuliah Kerja Nyata, UNNES Giat 7 Desa Malangan, Kabupaten Klaten, dengan mengusung tema “Desa Penggerak Pancasila”. Berkolaborasi dengan Karang Taruna setempat berupaya meresponnya dengan melakukan sosialisasi, mengenai pentingnya pendidikan politik generasi muda. Serta mengajak bersama-sama seluruh masyarakat di Desa Malangan untuk merekonstruksi paradigma Pemilu sebagai pesta demokrasi, menjadi Pemilu sebagai gotong royong demokrasi. Sosialisasi dan pendidikan politik ini menjadi sebuah tanggung jawab moral institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi dengan nilai “Tri Dharma Perguruan Tinggi” kepada masyarakat. Menjadi suatu agenda yang penting guna mendorong Pemilu yang bebas dari politik uang dan kampanye hitam [10]. Secara estuari gotong royong demokrasi meletakkan tentang pentingnya peranan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan Pemilu yang esensial dan substantif. Gotong royong demokrasi diproyeksikan sebagai proses demokrasi politik yang memberikan ruang yang lapang untuk berjalannya *rotation of power*, yang mengindahkan kepentingan bersama untuk kemajuan bangsa [11].

UNNES Giat 7 Desa Malangan merupakan sebuah program yang didesain oleh pihak Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata Universitas Negeri Semarang, bermitra dengan Badan Pengawal Ideologi Pancasila yang mengusung tema atau misi “Desa Penggerak Pancasila”. Mahasiswa yang diterjunkan langsung ke masyarakat diharapkan dapat mendorong tetap lestari nilai-nilai pancasila sebagai ideologi bangsa, seperti *spirit* persatuan dan gotong-royong. Sedangkan sosialisasi dan pendidikan politik yang didesain dengan mengutamakan kepada generasi muda, ditujukan untuk mendorong timbulnya public of interest atau kepekaan politik. Karena pada Pemilu tahun 2024 nanti, generasi muda memegang peranan sentral dengan begitu dominannya kuantitas mereka yang akan menjadi pemilih pemula nantinya [2]. Pemilih pemula atau generasi muda adalah konstituen dengan rentan usia 17-21 tahun, menjadi bagian dari 55% pemilih atau sekitar 114 juta pemilih [12].

Sosialisasi dan pendidikan politik ini menjadi penting untuk dilakukan, karena di Desa Malangan terdapat suatu kesepakatan atau kebijakan unik yang melarang segala bentuk kampanye (termasuk didalamnya atribut kampanye) untuk memasuki wilayah teritori desa, hal ini bertujuan guna menjamin stabilitas dan kondusifitas masyarakat. Namun disisi lain, kebijakan semacam ini justru akan memberikan implikasi negatif dan seakan-akan membentuk tembok tebal untuk berlangsungnya proses pencerdasan dan pendewasaan politik masyarakat dalam sebuah negara demokrasi secara alamiah dan organik. Maka dari itu, tim kelompok UNNES Giat 7 Desa Malangan berupaya untuk mencegah hal tersebut terjadi dengan memberikan sebuah momentum substansial untuk masyarakat untuk meningkatkan literasi politik melalui pendidikan politik, yang *output* konkretnya ialah mengajak masyarakat untuk “merubah paradigma pemilu sebagai pesta demokrasi, menjadi pemilu sebagai gotong royongdemokrasi”.

2. METODE

Kelompok UNNES Giat 7 Desa Malangan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan politik dengan tema “Menumbuhkan Kesadaran Partisipasi Politik Anak Muda dan Persatuan Masyarakat Menjelang Pemilu 2024 Sebagai Bentuk Gotong Royong Demokrasi” melewati beberapa tahapan kegiatan. Tahap pertama adalah analisis fenomena, yaitu melakukan observasi social terhadap kondisi sosial dan politik di Desa Malangan, meliputi beberapa informasi dari perangkat desa dan pembacaan analisis atas fenomena langsung dari lingkungan warga sekitar. Tahapan kedua adalah inventaris permasalahan dan melakukan komprasi dengan bagaimana kondisi ideal seharusnya, seperti yang sudah dijelaskan secara detail di bagian pendahuluan. Tahapan ketiga ialah perencanaan sesuai dengan hasil observasi dan inventaris yang telah dilakukan. Tahapan keempat adalah pelaksanaan kegiatan. Tahapan kelima atau yang terakhir, adalah evaluasi pelaksanaan kegiatan. Berikut diagram tahapan pelaksanaan kegiatan ini.



Gambar 1. Diagram Metode Penelitian

2.1 Analisis

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan pendahuluan di atas, dapat diterjemahkan kondisi Desa Malangan membutuhkan adanya penguatan literasi politik untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya pemilih pemula dan generasi muda. Berkaitan dengan misi program UNNES Giat 7 “Desa Penggerak Pancasila” rasanya akan sangat relevan ketika menggunakan pisau analisis berdasarkan nilai-nilai pancasila seperti semangat persatuan dan gotong royong sebagai jawaban konkret guna mewujudkan kedaulatan politik.

2.2 Inventaris Permasalahan

Setelah melakukan analisis dengan berbagai pihak, diantaranya ialah perangkat desa setempat, karang taruna Dukuh Asri dan beberapa masyarakat di Desa Malangan. Kelompok UNNES Giat 7 menemukan permasalahan yang cukup unik, yaitu ketika adanya kebijakan untuk melarang segala bentuk kampanye berupa poster, spanduk, dan banner di wilayah di Desa Malangan, khususnya di Dukuh Asri. Kebijakan tersebut ditetapkan langsung oleh perangkat desa dan disetujui oleh masyarakat setempat. Alasan mendasar dari kebijakan tersebut ialah ditujukan untuk menjaga kondusifitas masyarakat ketika proses Pemilu serentak berlangsung. Akan tetapi di sisi lain, kondisi tersebut akan berdampak negatif untuk masyarakat sebagai pemilih atau konstituen, khususnya pemilih generasi muda yang menjadi pemilih pemula. Mereka tidak dapat mengetahui dan memahami tentang dinamika politik yang berkembang di tingkat lokal.

2.3 Perencanaan

Adapun dalam proses perencanaan kegiatan sosialisasi pendidikan politik ini tim kelompok UNNES Giat 7 Desa Malangan berkolaborasi dengan Karang Taruna Dukuh Asri, Desa Malangan. Proses perencanaan tersebut ditampilkan oleh Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Tabel Perencanaan Kegiatan

Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan
Koordinasi dengan Pihak Kelurahan Malangan	Koordinasi sekaligus meminta izin dan <i>support</i> kegiatan kepada pak Lurah

Koordinasi dengan Pihak Karang Taruna Dukuh Asri, Kelurahan Malang	Koordinasi sekaligus memaparkan konsep kegiatan dan substansi materi yang akan disampaikan
Penyiapan Materi	Materi yang akan digunakan adalah “Menumbuhkan Kesadaran Partisipasi Politik Anak Muda Dan Persatuan Masyarakat Menjelang Pemilu 2024 Sebagai Bentuk Gotong Royong Demokrasi”
Sosialisasi jadwal kegiatan	Jadwal diberikan kepada peserta yang akan mengikuti kegiatan, target sarannya karang taruna dan seluruh anak muda di Dukuh Asri, Desa Malang
Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Politik	Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Politik diikuti oleh 20 anak muda Dukuh Asri, Desa Malang
Evaluasi Kegiatan	Evaluasi kegiatan guna mengetahui apa sekiranya yang perlu diperbaiki

2.4 Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di halaman rumah salah satu warga Desa Malang dalam serangkaian agenda kolaborasi dengan Karang Taruna Dukuh Asri, Desa Malang dalam menyambut tahun baru 2024. Diikuti oleh 20 orang anak muda yang menjadi sasaran utama, dan juga disemarakkan oleh beberapa warga yang turut menyaksikan. Materi yang disampaikan mengusung tema “Menumbuhkan Kesadaran Partisipasi Politik Anak Muda Dan Persatuan Masyarakat Menjelang Pemilu 2024 Sebagai Bentuk Gotong Royong Demokrasi”. *Rundown* pelaksanaan kegiatan ditampilkan Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Tabel *Rundown* Kegiatan

Waktu	Deskripsi Kegiatan	Durasi
19.30–19.35 WIB	Sambutan Ibu Lurah Malang	5 Menit
19.35–19.40 WIB	Sambutan dari Koormades Kelompok UNNES Giat 7 Desa Malang	5 Menit
19.40-20.30 WIB	Pemaparan Materi “Menumbuhkan Kesadaran Partisipasi Politik Anak Muda Dan Persatuan Masyarakat Menjelang Pemilu 2024 Sebagai Bentuk Gotong Royong Demokrasi”	50 Menit
20.30-20.50 WIB	Diskusi/Tanya Jawab	20 Menit
20.50-21.00 WIB	Penutupan oleh Kelompok UNNES Giat 7 Desa Malang	10 Menit

2.5 Evaluasi

Setelah kegiatan sosialisasi selesai, akan dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitas kegiatan. Evaluasi ini meliputi proses pengisian link kuisisioner untuk peserta kegiatan sosialisasi. Selanjutnya mahasiswa UNNES Giat 7 Desa Malang akan berkoordinasi dengan pihak perangkat desa, untuk menyerahkan hasil kegiatan sosialisasi. Kemudian memberikan masukan untuk menilik kembali kebijakan yang telah digulirkan, khususnya mengenai dampak negatif terhadap pemilih generasi muda. Karena momentum Pemilu serentak tahun 2024, seharusnya juga menjadi momentum dalam rangka proses penguatan literasi dan pemahaman kondisi politik lokal di sekitarnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi pendidikan politik telah dilaksanakan dengan peserta, materi, dan jadwal sesuai dengan yang sudah direncanakan. Materi “Menumbuhkan Kesadaran Partisipasi Politik Anak Muda dan Persatuan Masyarakat Menjelang Pemilu 2024 Sebagai Bentuk Gotong Royong Demokrasi” disampaikan oleh tim kelompok UNNES Giat 7 Desa Malangan. Pada kegiatan sosialisasi tersebut dijelaskan mulai dari teoritis tentang pancasila terkait dengan pentingnya persatuan dan gotong-royong, juga mengenai pemilu dan pentingnya partisipasi politik khususnya generasi muda, yang tujuannya adalah mengajak bersama-sama warga Dukuh Asri Desa Malangan untuk mendekonstruksi/merubah paradigma pemilu sebagai pesta demokrasi, menjadi pemilu sebagai gotong royongdemokrasi.

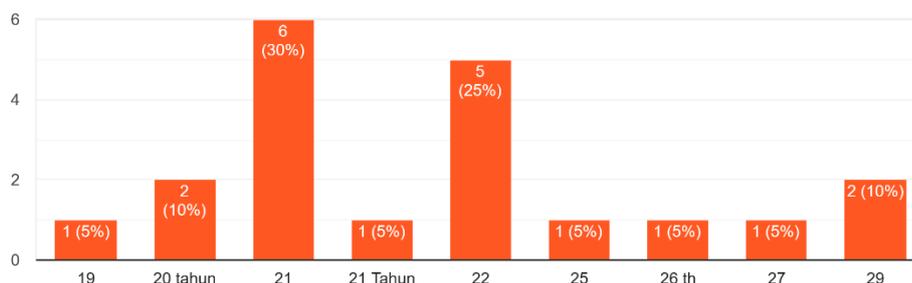
Gambar 2. di bawah ini adalah dokumentasi narasumber menyampaikan materi sosialisasi pendidikan politik terkait ajakan untuk merubah paradigma pemilu sebagai pesta demokrasi, menjadi pemilu sebagai gotong royongdemokrasi.



Gambar 2. Narasumber menyampaikan materi

Setelah materi dipaparkan oleh narasumber, tim kelompok UNNES Giat 7 mengadakan post-test untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta terkait materi yang disampaikan, juga sebagai bentuk data konkret secara kualitatif mengenai bagaimana respon peserta tentang seruan dan ajakan untuk bersama-sama membangun konstruksi pemilu sebagai gotong royong demokrasi. Variabel pertama adalah usia atau umur peserta, gambar 3. di bawah akan menunjukkan data persebaran umur para peserta.

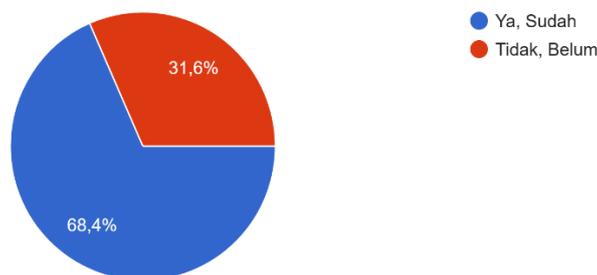
Usia/Umur
20 jawaban



Gambar 3. Diagram usia/umur peserta sosialisasi pendidikan politik

Variabel kedua adalah klasifikasi peserta yang termasuk kedalam kategorisasi pemilih pemula dan/atau pemilih muda. Kedua klasifikasi tersebut menjadi poros utama tujuan sosialisasi pendidikan politik untuk generasi muda. Gambar 4. di bawah adalah menunjukkan bahwa sebanyak 31,6 % peserta adalah pemilih pemula yang baru bisa mendapatkan dan menggunakan hak pilihnya, dan 68,4 % peserta masuk ke kategorisasi pemilih muda secara general.

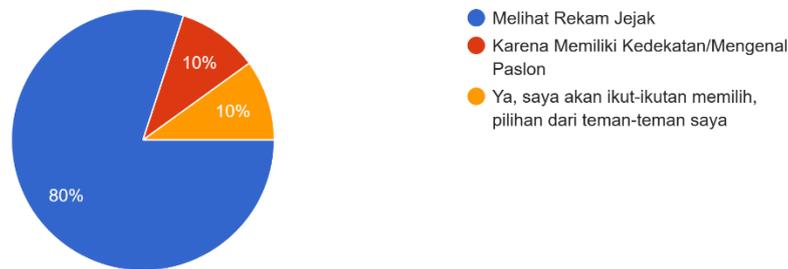
Sebelum Pemilu 2024 nanti, apakah anda sudah mendapatkan hak memilih pada pemilu 2019 ?
19 jawaban



Gambar 4. Diagram Klasifikasi dalam kategorisasi pemilih pemula dan pemilih muda secara umum

Variabel ketiga adalah terkait orientasi dan alasan memilih generasi muda di Dukuh Asri, Desa Malangan pada pemilu 2024 nanti. Guna mengukur secara konkret potensi sejauh mana perbedaan di masyarakat dan memicu disintegrasi sosial. Mengimplementasikan nilai Pancasila, persatuan dan gotong royong menjadi jawaban konkret, seperti yang disampaikan pada materi sosialisasi untuk menghindari disintegrasi masyarakat karena momentum pemilu. Gambar 5. di bawah menunjukkan masih ada 10% generasi muda yang memilih karena faktor ikut-ikutan mayoritas pilihan dari lingkungan sekitarnya, yang juga implikasi dari derasnya arus informasi melalui gadget dewasa ini. Namun di luar itu, ada 80% peserta yang sudah cukup dewasa dan rasional dengan menentukan pilihan berdasarkan rekam jejak, dan 10% sisanya memilih karena faktor kedekatan dengan paslon konstantan pemilu.

Alasan apa yang akan anda gunakan untuk menentukan siapa yang akan anda pilih nantinya ?
20 jawaban



Gambar 5. Diagram Klasifikasi dari orientasi peserta dalam memilih nantinya

Variabel terakhir adalah bagaimana respon peserta terkait ajakan tim kelompok UNNES Giat 7 untuk merubah paradigma pesta demokrasi menjadi gotong royong demokrasi. Gambar 6. di bawah menunjukkan seluruh peserta menyambut baik dengan narasi/ajakan tersebut.

Bagaimana anda merespon ajakan Tim Kelompok UNNES Giat 7 Desa Malangun untuk merubah paradigma pemilu sebagai pesta demokrasi, menjadi pemilu sebagai "Gotong-Royong Demokrasi" ?
20 jawaban



Gambar 6. Diagram Hasil dari ajakan untuk mewujudkan gotong royong demokrasi

Pada titik ini, penelitian ini berupaya menyandarkan dirinya kepada konstruksi nilai gotong royong sebagai intisari dari Pancasila. Konstruksi tersebut dapat ditelaah melalui Pidato Presiden Sukarno yang berjudul “Lahirnya Pancasila” ketika sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945. Pidato Presiden Sukarno tersebut dinilai menjadi sumber pertama bangsa Indonesia mengenal Pancasila, yang menjadi dasar atas formulasi urutan sila-sila seperti Pancasila yang dikenal saat ini [13]. Karena nilai gotong royong akan menemukan titik didih kompleksitasnya, ketika dapat diterjemahkan melalui penalaran secara konseptual dan filosofis.

Presiden Sukarno mengusulkan lima sila dalam Pancasila, yang meliputi sila kebangsaan, sila internasionalisme atau perikemanusiaan, sila mufakat atau demokrasi, sila kesejahteraan sosial, dan sila ketuhanan. Kelima sila tersebut berusaha disederhanakan oleh Presiden Sukarno menjadi Trisila dan Ekasila. Trisila meliputi Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, dan Ketuhanan yang Berkebudayaan. Sedangkan Ekasila adalah gotong royong, menjadi nilai yang paling mendasari dari pondasi bangunan Pancasila [14]. Melalui penerjemahan secara filosofis ini, gotong royong sebagai intisari Pancasila dapat dieja sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang holistik, runtut, solid, dan koheren [15].

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan sosialisasi pendidikan politik dengan tema “Menumbuhkan Kesadaran Partisipasi Politik Anak Muda dan Persatuan Masyarakat Menjelang Pemilu 2024 Sebagai Bentuk Gotong Royong

Demokrasi” yang diinisiasi oleh tim kelompok UNNES Giat 7 Desa Malang dapat berdampak positif bagi masyarakat warga Desa Malang, khususnya untuk generasi muda yang memiliki peranan begitu sentral dalam menyongsong pemilu 2024 yang berhasil dan berintegritas. Adanya kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong kemandirian berpikir generasi muda dan dapat menciptakan ruang kritisisme yang lebih meluas dan inheren di dalam berlangsungnya susunan masyarakat dalam negara yang demokratis. Terakhir, merubah paradigma pemilu sebagai pesta demokrasi menjadi gotong royongdemokrasi sebuah keniscayaan, baik secara konseptualisasi dan internalisasi nilai di dalamnya hingga menyentuh alam bawah kesadaran kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di Desa Malang. Kesadaran akan persatuan dan gotong royong demi terciptanya politik yang berdaulat, ekonomi yang berdikari, dan berkepribadian yang berketuhanan. Sebagaimana internalisasi nilai Trisakti yang pernah dikemukakan oleh Presiden Sukarno yang dapat menunjang kesadaran akan cita-cita Pancasila itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Prasetyoningsih, “Dampak pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia,” *J. Media Huk.*, vol. 21, no. 2, p. 1—23, 2014.
- [2] Azirah, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pesta Demokrasi Political Participation of New Voters in the Democratic Party,” *J. Law Governement Sci. Vol. 10 No.2 Oktober 2024*, vol. 10, no. 2, pp. 10–21, 2024.
- [3] H. Nugroho, “Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia,” *J. Pemikir. Sociol.*, vol. 1, no. 1, p. 1, 2015.
- [4] S. Pamungkas, *Perihal Pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009.
- [5] P. Limilia and E. Ariadne, “Pengetahuan dan persepsi politik pada remaja,” *J. Psikol. Sos.*, vol. 16, no. 1, pp. 45–55, 2018.
- [6] N. K. A. T. Devi and I. G. F. S. Tapa, “Tantangan Dan Risiko Yang Dihadapi Dalam Pemilu Tahun 2024,” *BERNAS J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 5, no. 3, pp. 2009–2013, 2024.
- [7] F. Azirah, Kesumawati, “Pemanfaatan Media Sosial Untuk Sosialisasi Pemilih Pemula Dalam Pesta Demokrasi Bagi Kalangan Mahasiswa di Universitas Ubuditah Indonesia,” *J. Law Governement Sci. Vol. 10 No.2 Oktober 2024*, vol. 4, no. 02, pp. 7823–7830, 2024.
- [8] G. I. Maulana, P. I. Fridawati, and H. Masruroh, “Pemilu 2024: Pesta demokrasi akbar pembangkit kondisi ekonomi pasca pandemi,” *J. Integr. dan Harmon. Inov. Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 2, no. 8, pp. 751–757, 2022.
- [9] R. Sacipto, “Tinjauan Wawasan Kaum Milineal Menghadapi Pelaksanaan Pesta Demokrasi,” *Adil Indones. J.*, vol. 1, no. 3, pp. 51–60, 2019.
- [10] H. J. Simon, H. F. Hanum, and Suardi, “Pengaruh Sosialisasi Terhadap Pencegahan Politik Uang, Kampanye Hitam Dan Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Didesa Bulu China,” *J. Publik Reform UNDHAR MEDAN*, no. 1, pp. 24–42, 2018.
- [11] T. N. Effendi, “Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini,” *J. Pemikir. Sociol.*, vol. 2, no. 2, 2013.
- [12] N. Husniyah, E. D. B. Tarigan, and Y. B. P. Siringoringo, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Pemilih Usia Muda dalam Pemilihan Presiden 2024 di Kota Medan menggunakan Regresi Logistik Biner,” *Pattimura Proceeding Conf. Sci. Technol.*, vol. 5, no. 1, pp. 133–142, 2024.
- [13] B. Dahm, *Soekarno dan Perjuangan*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- [14] I. Siswo, *Panca Azimat Revolusi: Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato Sukarno 1926-1966 Jilid I*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
- [15] Y. Latif, *Negara Paripurna Historitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2015.